

**APLIKASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BERBASIS WEB DAN EMAIL GATEWAY
(STUDI KASUS PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN)**

**INFORMATION AND DOCUMENTATION MANAGEMENT APPLICATION (PPID)
WEB-BASED AND EMAIL GATEWAY
(CASE STUDY OF KLATEN REGENCY GOVERNMENT)**

Zakiah Khatami Romadhonna¹, Hanung Nindito Prasetyo, S.Si, M.T.², Tedi Gunawan, S.T.,
M.Kom.³

^{1,2,3}Prodi D3 Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Terapan, Universitas Telkom
Jl. Telekomunikasi No. 01, Terusan Buah Batu, Sukapura, Dayeuhkolot, Sukapura, Dayeuhkolot,
Bandung, Jawa Barat 40257

zakiahkhatami@student.telkomuniversity.ac.id, hanungnp@tass.telkomuniversity.ac.id,
tedi@tass.telkomuniversity.ac.id

ABSTRAK

Pemerintah Kabupaten Klaten adalah instansi pemerintah yang berfokus pada meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, untuk meningkatkan pelayanan masyarakat ini Pemerintah Kabupaten Klaten memberikan fasilitas berupa website. Salah satu website Pemerintah Kabupaten Klaten adalah website Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi yang berfungsi untuk memberikan segala informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, namun website yang digunakan saat ini memiliki kekurangan berupa tidak adanya fitur notifikasi. Fitur ini berfungsi sebagai pengingat atau pemberitahuan baik untuk masyarakat yang meminta data maupun OPD terkait. Dari permasalahan tersebut maka diusulkan diberikan fitur tambahan berupa fitur notifikasi Email Gateway untuk mempermudah arus data baik masyarakat dan OPD terkait, serta menambahkan fitur upload data untuk mempermudah PPID Pembantu dalam proses input data. Dalam pembangunan aplikasi ini menggunakan metode Waterfall dan menggunakan Framework Codeigniter dan basis data MySQL. Dengan adanya fitur tambahan ini diharapkan dapat mempercepat arus data yang berjalan sehingga aplikasi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi ini dapat digunakan dengan maksimal.

Kata Kunci: Aplikasi, Informasi dan Dokumentasi, Notifikasi.

ABSTRACT

Klaten Regency Government is a government agency that focuses on improving services to the community, to improve this community service, Klaten Regency Government provides facilities using websites. One of the websites of Klaten Regency Government is the Information and Documentation Management website which serves to provide all the information needed by the community, but the website used today has the disadvantage of not having a notification feature. This feature serves as a reminder or notification for people who request data and related OPD. From these problems, it is proposed to be given additional features in the form of an Email notification feature to facilitate data flow between the public and the relevant OPD, and add a data upload feature to facilitate the PPID Helper in the data input process. In building this application using the Waterfall method and using the Codeigniter Framework and MySQL database. With the addition of this additional feature, it is expected to accelerate the flow of data that is running so that the Information Management and Documentation application can be used optimally.

Keywords: Application, Information and Documentation, Notification.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan Daerah disebut juga Daerah Tingkat II merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia [1]. Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting dari ketahanan nasional. Sebuah informasi diperlukan untuk melakukan Keterbukaan Informasi sebagai sarana untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya, dan pengelolaan informasi publik merupakan upaya untuk mengembangkan masyarakat informatif [2].

Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten adalah salah satu pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Salah satu tugas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten yaitu mengoordinasikan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Klaten untuk perangkat daerah [1]. PPID memiliki tujuan utama yaitu menjadi pedoman bagi seluruh perangkat Daerah tentang pengelolaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel [3]. PPID memiliki 2 jenis yaitu PPID Utama dan PPID Pembantu yang secara umum memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat [3]. Informasi publik yang diberikan kepada masyarakat berupa informasi wajib berkala, wajib serta merta, dan wajib setiap saat.

Aplikasi Layanan Informasi Pemkab Klaten yang digunakan sebelumnya memiliki beberapa masalah yang menghambat proses pengelolaan informasi dan dokumentasi. Kekurangan dari aplikasi yang sudah ada yaitu tidak adanya pemberitahuan status pengajuan kepada pemohon. Sehingga, ketika tidak ada respon, pemohon harus datang langsung ke Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) terkait. Selain itu, OPD di Kabupaten Klaten harus menyerahkan berkas informasi publik kepada Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Klaten selaku PPID Utama karena tidak dapat mengunggah informasi publik secara mandiri.

Dengan adanya informasi di atas, maka diusulkan aplikasi yang berjudul "Aplikasi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Berbasis Web Studi Kasus Pemerintah Kabupaten Klaten". Aplikasi ini dapat memudahkan masyarakat Kabupaten Klaten dalam mengetahui proses permintaan data. Dengan aplikasi ini juga mempermudah arus informasi dan permintaan data dari PPID Utama ke PPID Pembantu

di Kabupaten Klaten dan memudahkan PPID dalam membuat laporan.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari Proyek Akhir ini adalah :

1. Bagaimana mempermudah arus informasi dan permintaan data di PPID Kabupaten Klaten?
2. Bagaimana memudahkan PPID Pembantu dalam melakukan input data?
3. Bagaimana memudahkan PPID dalam pembuatan laporan?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari Proyek Akhir ini adalah membuat Aplikasi yang dapat :

1. Membantu arus informasi dan permintaan data di PPID Kabupaten Klaten dengan menambahkan fitur notifikasi Email Gateway.
2. Membantu PPID Pembantu dengan menambahkan fitur upload, sehingga proses input data yang dilakukan dapat lebih cepat.
3. Membantu PPID dalam pembuatan laporan secara berkala.

1.4 Batasan Masalah

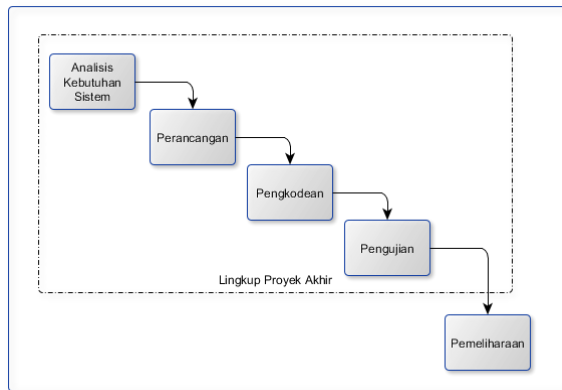
Beberapa hal yang menjadi batasan masalah dalam pembuatan aplikasi ini adalah :

1. Aplikasi ini tidak melayani pengajuan keberatan dalam pelayanan informasi Publik, hanya menyediakan formulir pengajuan keberatan.
2. Pemberitahuan pada aplikasi ini hanya untuk pembuatan akun dan validasi permohonan melalui media Email kepada pemohon yang terkait.
3. Aplikasi ini tidak menyalurkan laporan kepada Komisi Informasi dan Departemen Dalam Negeri.
4. Periode pembuatan laporan setiap satu bulan dan 12 bulan sekali.
5. Aplikasi ini tidak melayani permohonan informasi publik yang dikecualikan.

1.5 Metode Pengerjaan

Metode pengerjaan dalam penyusunan proyek akhir ini menggunakan metode *Software Development Life Cycle* (SDLC) dengan model *waterfall*. Model *waterfall* [4] ini sering disebut juga metode air terjun, metode ini merupakan metode dengan pendekatan spesifik yang sistematis dan berurutan dalam pengembangan perangkat lunak, dimana setiap tahapan harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum ke tahap berikutnya.

Pada metode *waterfall* ini terdapat langkah-langkah, dapat dilihat pada gambar 1:



Gambar 1 1 Model Waterfall [4]

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Dasar

Pada bagian ini akan dijelaskan definisi dasar dari istilah terkait dengan pembuatan Aplikasi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.

2.1.1 Informasi

Adapun salah satu definisi Informasi yaitu [1] :

“Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non-elektronik”.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Informasi adalah pernyataan yang mengandung fakta dan disajikan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.

2.1.2 Informasi Publik

Adapun salah satu definisi Informasi Publik yaitu [1] :

“Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara atau penyelenggaraan Negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik”.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Informasi Publik adalah informasi yang diterima oleh Badan Publik yang berkaitan dengan kepentingan publik.

2.1.3 Informasi Publik Wajib Berkala

Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami, meliputi [1]:

- Informasi yang berkaitan dengan SKPD dan BUMD;

- Informasi mengenai kegiatan dan kinerja SKPD dan BUMD;
- Informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
- Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.4 Informasi Publik Wajib Serta Merta

Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Dengan cara yang mudah dijangkau masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami [1].

2.1.5 Informasi Publik Wajib Setiap Saat

Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat [1] :

- Daftar seluruh informasi publik yang berada dibawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
- Hasil keputusan Pimpinan SKPD/ BUMD dan pertimbangannya;
- Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
- Rencana kerja proyek, termasuk perkiraan pengeluaran tahunan SKPD/BUMD;
- Perjanjian SKPD/ BUMD dengan pihak ketiga;
- Infomasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
- Prosedur kerja pegawai SKPD/BUMD yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
- Laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.6 Informasi Publik yang Dikecualikan

Informasi publik yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang meliputi [1] :

- Informasi yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas, dan rahasia sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan kepentingan umum.
- Informasi publik yang dikecualikan ditetapkan berdasarkan pada pengujian atas konsekuensi yang timbul apabila informasi diberikan kepada masyarakat dan melalui pertimbangan yang seksama.
- Pertimbangan dalam informasi publik yang dikecualikan adalah apabila dengan menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

2.1.7 PPID

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi memiliki dua jenis berdasarkan tugasnya yaitu PPID

utama dan PPID pembantu [1] :

“PPID Utama adalah pengelola informasi publik yang bertugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di tingkat Kabupaten dan mengkoordinasikan pengelolaan informasi yang dilaksanakan oleh PPID SKPD”

“PPID Pembantu adalah pejabat yang bertanggungjawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi, dan pelayanan informasi di lingkungan SKPD”.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa PPID adalah pengelola informasi publik yang bertugas mengelola informasi di lingkungan SKPD.

ANALISIS DAN PERANCANGAN

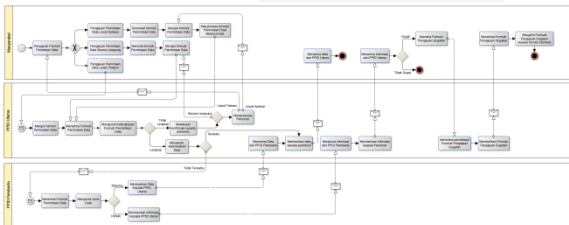
3.1 Analisis

3.1.1 Proses Bisnis Berjalan

Proses bisnis yang berjalan merupakan pekerjaan atau aktivitas yang sedang terjadi dan telah menjadi rutinitas sebelum adanya sistem baru yang diterapkan. Adapun proses bisnis yang berjalan dalam proses pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Pemerintah Kabupaten Klaten, adalah :

1. Proses Permintaan Data PPID

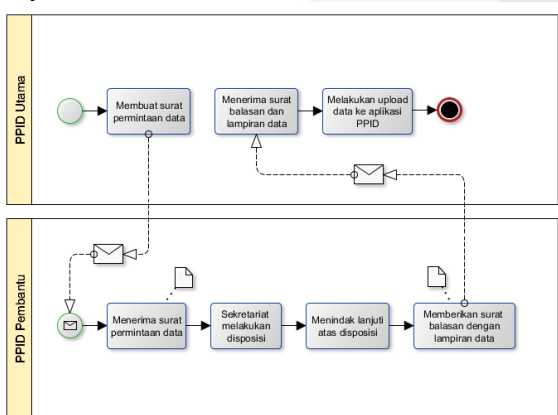
Berikut adalah gambaran Proses Permintaan Data PPID berjalan.



Gambar 3. 1 Proses Permintaan Data PPID

2. Proses Input Data PPID

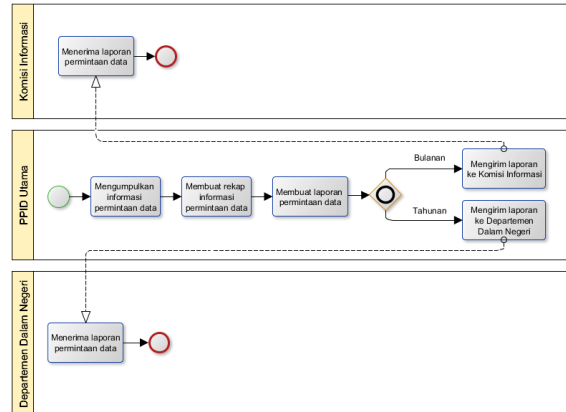
Berikut adalah gambaran Proses Input Data PPID berjalan.



Gambar 3. 2 Proses Input Data PPID

3. Proses Pelaporan Data PPID

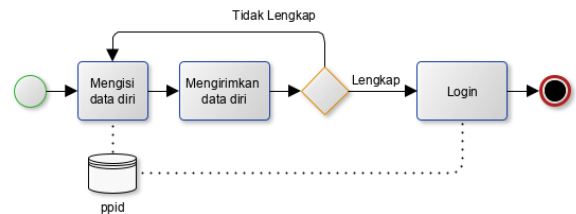
Berikut adalah gambaran Proses Pelaporan Data PPID berjalan.



3.1.2 Proses Bisnis Usulan

1. Proses Registrasi Pemohon

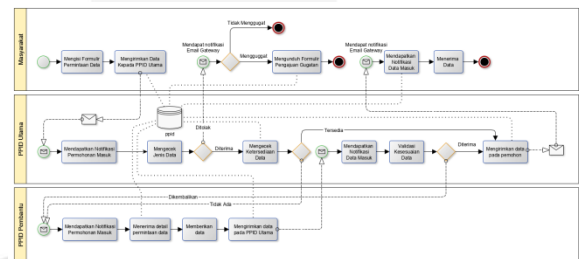
Berikut adalah gambaran Proses Registrasi Pemohon usulan :



Gambar 3. 3 Proses Registrasi Pemohon

2. Proses Permintaan Data PPID

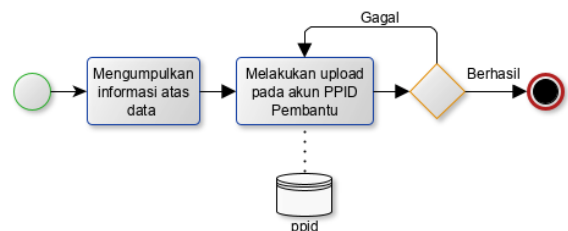
Berikut adalah gambaran Proses permintaan data PPID usulan :



Gambar 3. 4 Proses Permintaan Data PPID

3. Proses Input Data PPID

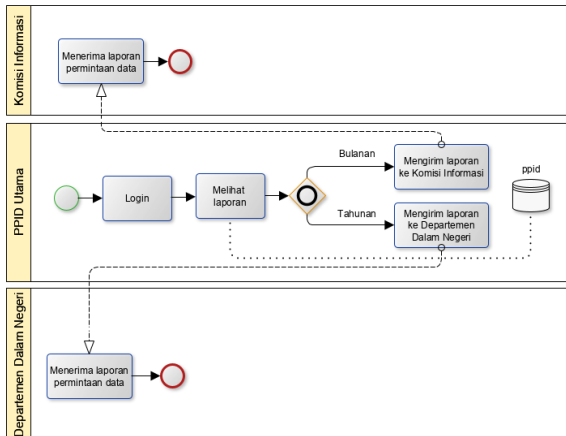
Berikut adalah gambaran Proses input data PPID usulan :



Gambar 3. 5 Proses Input Data PPID

4. Proses Pelaporan Data PPID

Berikut adalah gambaran Proses Pelaporan PPID usulan :

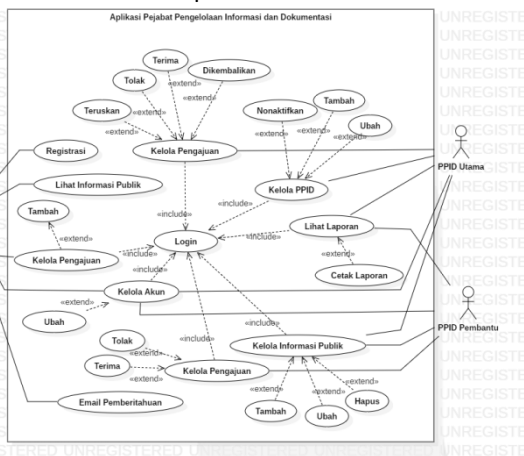


Gambar 3. 6 Proses Pelaporan Data PPID

3.2 Perancangan

3.2.1 Use Case Diagram

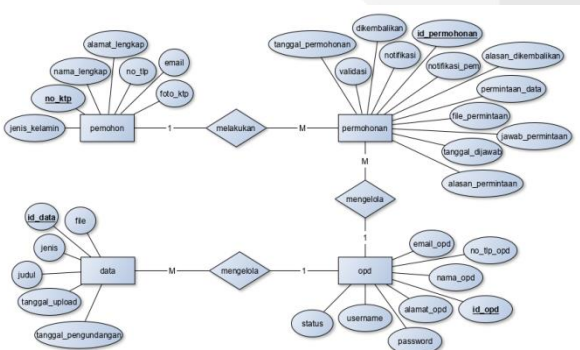
Berikut merupakan Use Case Diagram untuk Aplikasi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Studi Kasus Pemerintah Kabupaten Klaten:



Gambar 3. 7 Use Case Diagram

3.2.2 ER Diagram

Berikut ini merupakan ER Diagram Fungsionalitas pengguna dari Aplikasi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Studi Kasus Pemerintah Kabupaten Klaten:



Gambar 3. 8 ER Diagram

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

4.1 Implementasi

Berikut ini adalah tahapan implementasi aplikasi,

pada tahapan ini aplikasi sudah berbentuk tampilan sesungguhnya.

4.1.1 Halaman Informasi Publik

Berikut merupakan tampilan halaman informasi publik, yang digunakan sebagai media informasi tentang daftar informasi wajib yang dapat diakses dan didapatkan tanpa memiliki akun.



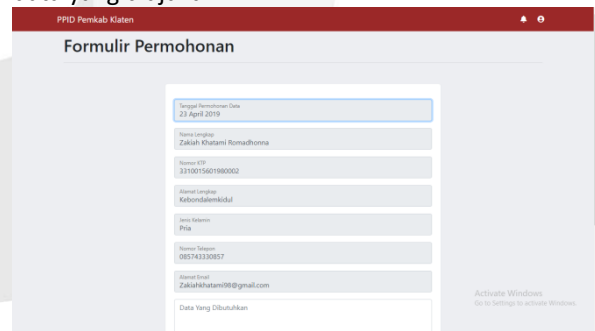
Gambar 4. 1 Implementasi Antarmuka Informasi Publik



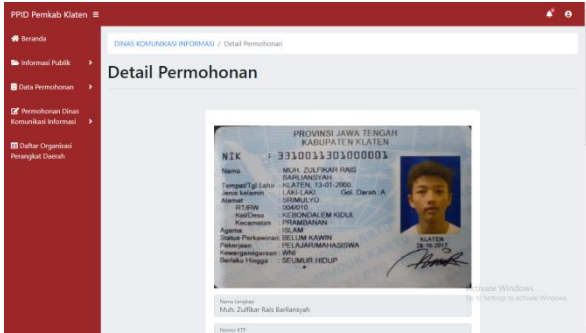
Gambar 4. 2 Implementasi Antarmuka Detail Data

4.1.2 Halaman Formulir Permohonan

Berikut merupakan tampilan halaman formulir permohonan, yang digunakan untuk melakukan pengajuan yang berisi detail data pemohon berserta data yang diajukan.



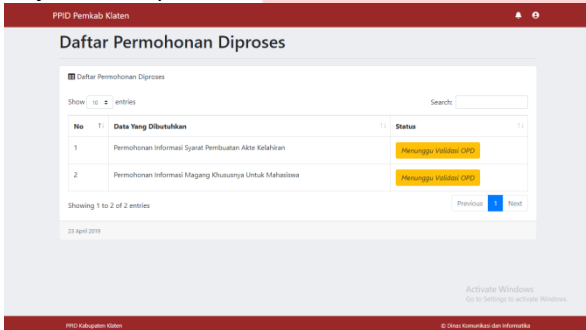
Gambar 4. 3 Implementasi Antarmuka Formulir Permohonan Pemohon



Gambar 4. 4 Implementasi Antarmuka Detail Permohonan PPID

4.1.3 Halaman Status Permohonan

Berikut merupakan tampilan halaman status permohonan, yang digunakan untuk melihat status permohonan dari permintaan data yang pernah diajukan oleh pemohon.



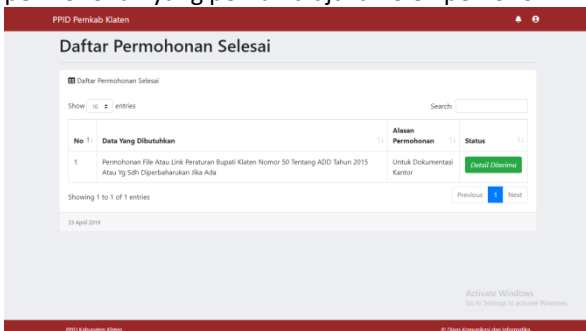
Gambar 4. 5 Implementasi Antarmuka Status Permohonan Pemohon



Gambar 4. 6 Implementasi Antarmuka Status Permohonan PPID

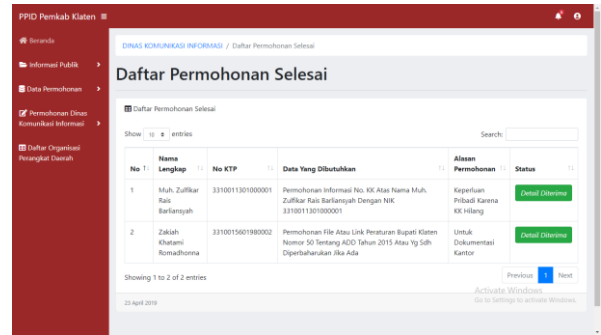
4.1.4 Halaman Riwayat Permohonan

Berikut merupakan tampilan halaman riwayat permohonan, yang digunakan untuk melihat riwayat permohonan yang pernah diajukan oleh pemohon.



Gambar 4. 7 Implementasi Antarmuka Riwayat

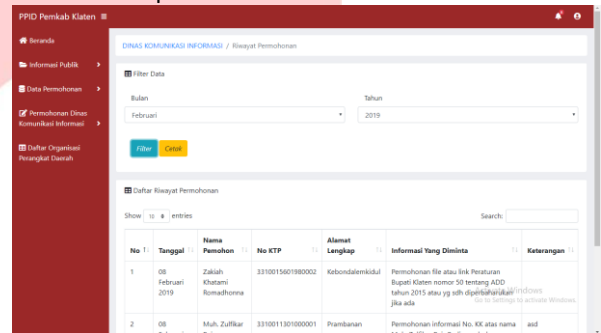
Permohonan Pemohon



Gambar 4. 8 Implementasi Antarmuka Riwayat Permohonan PPID

4.1.5 Halaman Laporan

Berikut merupakan tampilan halaman laporan, yang digunakan untuk melakukan pengolahan laporan bulanan maupun tahunan oleh PPID.



Gambar 4. 9 Implementasi Antarmuka Laporan PPID

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Bupati, Klaten, *Peraturan Bupati Klaten Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten*. Klaten: Sekretariat Daerah, 2016.
- [2] Republik, Indonesia, *UU RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Jakarta: Sekretariat Negara, 2008.
- [3] Bupati, Klaten, *Peraturan Bupati Klaten Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Klaten*. Klaten: Sekretariat Daerah, 2016.
- [4] Sommerville, Ian, *Software Engineering (Rekayasa Perangkat Lunak) Edisi 6 Jilid 1*. Jakarta: Erlangga, 2003.